

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020

Farida Ayu Lestari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
faridaayulestrai12345@gmail.com

Fransina W. Ballo

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
fransinaballo@staf.undana.ac.id

Novi Theresia Kiak

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
novi.kiak@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data Primer dengan analisis metode PEGR (*Poverty-Equivalent Growth Rate*) untuk mengetahui nilai pertumbuhan inklusif dan menggunakan analisis paht untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Hasil analisis untuk menunjukkan nilai pertumbuhan inklusif dari 21 daerah kabupaten dan 1 kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif yang menghasilkan temuan bahwa secara rata-rata tahun 2016-2020 pertumbuhan inklusif mengalami kenaikan di setiap tahunnya sehingga di tahun 2020 mengalami pencapaian tertinggi dengan rata-rata 0.64 yang mengakibatkan 21 kabupaten dan 1 kota Nusa Tenggara Timur sudah mencapai keadaan inklusif. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif menggunakan analisis jalur / (*path analysis*) dari hasil uji mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung pertumbuhan ekonomi inklusif tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang lain seperti tingkat kemiskinan dan gini rasio berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Terciptanya adanya pertumbuhan yang inklusif tidak serta hanya berpengaruh dari pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan, tingkat pengguran dan gini rasio sehingga untuk mempercepat adanya terwujudnya pertumbuhan inklusif di Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci : *Pertumbuhan Inklusif, Metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Paht Analysis*

ABSTRACT

This study aims to determine the value of inclusive economic growth and what factors influence inclusive economic growth in East Nusa Tenggara districts/cities in 2016-2020. This study uses primary data with PEGR (Poverty Equivalent Growth Rate) method analysis to determine the value of inclusive growth and uses paht analysis to determine the factors that influence inclusive growth. The results of the analysis to show the value of inclusive growth from 21 districts and 1 city that experienced inclusive economic growth resulted in the finding that on average in 2016-2020 inclusive growth has increased every year so that in 2020 it experienced the highest achievement with an average of 0.64 which resulted in 21 districts and 1 city of East Nusa Tenggara having reached an inclusive state. Furthermore, to find out what factors affect inclusive economic growth using path analysis / (path analysis) from the test results to know the factors that directly and indirectly influence inclusive economic growth, the level of unemployment on inclusive

economic growth and other factors. such as the poverty rate and the gini ratio influence indirectly through economic growth as an intervening variable. The creation of inclusive growth does not only affect economic growth in the poverty rate, unemployment rate and gini ratio so as to accelerate the realization of inclusive growth in East Nusa Tenggara.

Keywords : Inclusive Growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Method Path Analysi.

PENDAHULUAN

Semua negara baik negara maju maupun negara berkembang, tidak terlepas dari isu percepatan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dibutuhkan demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep pembangunan ekonomi, mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro,Smith, 2009:10). Kebijakan-kebijakan pemerintah dilakukan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik dengan memberikan beberapa program kegiatan, yang sehingga menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana kebijakan hal itu menciptakan kesejahteraan.

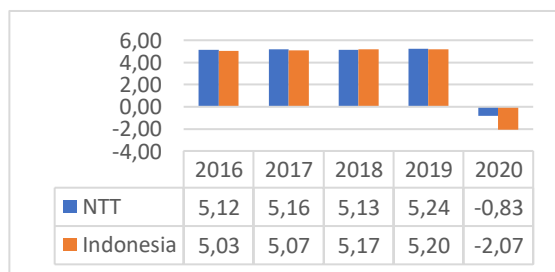
Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila adanya masyarakat yang mampu mengolah sumber daya dan memanfaatkannya dengan sangat baik digunakan untuk memproduksi barang dan jasa agar menciptakan mobilitas yang baik. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan seberapa jauh aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dalam periode tertentu (Sukirno, 2006:29). Pembangunan ekonomi sendiri harus memiliki tujuan dimana untuk menciptakan suatu perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pertumbuhan ekonomi inklusif sebuah proses memastikan semua kelompok masyarakat baik kalangan terpinggir dapat merasakan sepenuhnya proses pertumbuhan. Konsep ini bermaksud bahwa pemberian hak

yang sama terhadap masyarakat yang terpinggir di dalam proses pertumbuhan. (Rauniar, Kanbur, 2009:213). Pertumbuhan ekonomi inklusif menciptakan berbagai kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama, terlibatnya banyak masyarakat dari semua kalangan agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pertumbuhan ekonomi menciptakan sebuah ide-ide baru yang mampu merangsang perekonomian dan meningkatkan mobilitas masyarakatnya banyak negara-negara di dunia sudah merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi inklusif atau berkelanjutan.

Hasil-hasil yang dirasakan dari negara yang sudah merubah sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi inklusif dilihat dari tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita meningkat, penurunan angka kemiskinan, lapangan usaha semakin bervariasi, dan menurunkan tingkat pengangguran. *The United Nation Development Programme (UNDP)* dalam Azwar (2016) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang sama, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor growth*). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian yang diikuti oleh tiga indikator yaitu menurunnya ketimpangan masyarakat dan kemiskinan, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja (Klasen, 2010:285).

Grafik 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 1 Perbedaan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.12%, dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28.89%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 12.67%, reparasi mobil dan sepeda motor 11.07%, sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga 76.33%. PDRB Indonesia mencapai 5.03%, yang di dominasi lapangan usaha informasi dan komunikasi 9.57%, dan lembaga non-profit sebesar 6.72%. Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.16%, dominasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 13.59%, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit 6.86%, usaha pertanian, kehutanan, perikanan 28.72%. PDRB Indonesia mencapai 5.07% didominasi dari sisi produksi 1.70%, usaha pertanian, kehutanan, perikanan 21.60% dan kontribusi dari setiap Jawa 58.49%, Sumatera 21.66%, Kalimantan 8.20%.

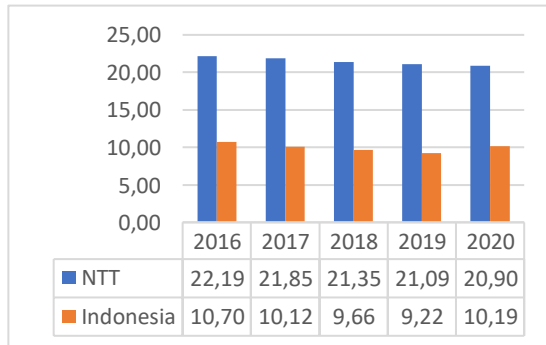
Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.13%, dominasi lapangan usaha perdagangan listrik dan gas 10.76%, pertanian, kehutanan, perikanan 28.40%, dan konsumsi rumah tangga 72%. PDRB Indonesia mencapai 5.18%, yang di dominasi lapangan usaha jasa dan lainnya 9.08%, pertanian, kehutanan, perikanan 21.41%, dan ekspor barang dan jasa 2.22%. Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.24%, dominasi lapangan usaha industri 9.14%, konstruksi 8.18%, dan pembentukan modal tetap bruto 5.02 %.

PDRB Indonesia mencapai 5.02%, yang di dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan 20.52%, dan komponen ekspor barang dan jasa 2.55%. Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB -0.83%, didominasi lapangan usaha jasa keuangan 13.15%, dari sisi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 1.06%, dan pertanian, kehutanan, perikanan 28.51%. PDRB Indonesia mencapai -2.07%, yang di dominasi lapangan usaha perikanan 20.15%, dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintahan 27.15%.

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan PDRB Indonesia selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 1 menunjukkan bahwa posisi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indonesia hal tersebut mengisyaratkan bahwa perekonomian di Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan lebih baik daripada nasional dikarenakan adanya perkembangan dari beberapa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan beberapa sektor usaha yang berkembang seperti pengembangan listrik, gas dan jasa yang sudah terjadi pengembangan dan di dukung keadaan perekonomian membaik dan mengalami peningkatan adapun hal-hal yang mengakibatkan adanya penurunan setiap tahunnya menciptakan reaksi terhadap beberapa pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dengan diiringi oleh kesejahteraan masyarakatnya meliputi PDRB, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang dalam ketidakmampuan ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi beberapa kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan dilihat dari seberapa besar garis kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan makan dan non makanan. Garis kemiskinan makan adalah kebutuhan yang dikeluarkan untuk makan dan minum, garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan yang dikeluarkan bukan untuk makan dan minum dilihat dari kebutuhan pendidikan, kesehatan perumahan, sandang dan kebutuhan lainnya.

Grafik 2
Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

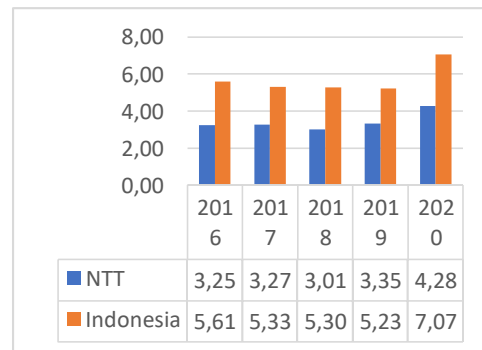
Grafik 2 Perbedaan tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 22.19%, peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 79.20%, periode september garis kemiskinan naik sebesar 1.26%, yaitu dari Rp 322,947 per kapita per bulan. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.70%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.19%, jumlah penduduk miskin di perkotaan 7.73%, dan pedesaan 13.96%. Tahun 2017 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.85% peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 78.83%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.12%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.35%, jumlah penduduk miskin di perkotaan 7.26%, dan pedesaan 13.47%.

Tahun 2018 Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.35%, peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 78.59%, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9.66%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.54%, garis kemiskinan bukan makanan 26.46%. Tahun 2019 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.09%, garis kemiskinan makanan 78.17%, dan garis kemiskinan bukan makanan 21.83%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9.22%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan 73.54%, garis kemiskinan bukan makanan

26.25%. Tahun 2020 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 20.90%, indeks kedalaman kemiskinan 3.96%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.19%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan 73.87%, garis kemiskinan bukan makanan 26.13%.

Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 2 menggambarkan tingkat kemiskinan Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional mengisyaratkan bahwa tingkat kemiskinan sangat tinggi diakibatkan kecilnya pendapatan per kapita rumah tangga, adapun beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (Sukirno, 2016). Pengangguran adalah masalah yang sangat serius yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap perekonomian baik itu individu maupun masyarakat, tingginya tingkat jumlah pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak bisa memaksimalkan tingkat kesejahteraan.

Grafik 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 3 Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020, Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Tingkat pengangguran Terbuka 3.25%, dikarenakan sektor pertanian 53.32%, jasa 16,42%, perdagangan 10.19%, dan sektor industri

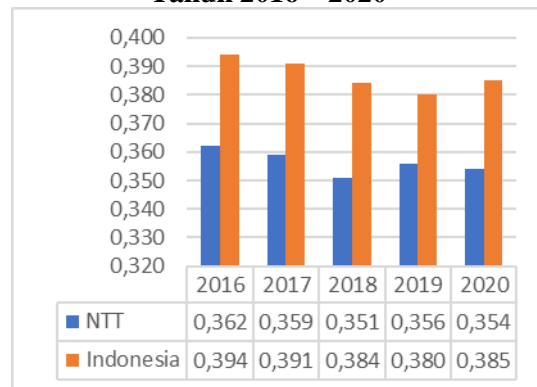
7.35%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.61%, dikarenakan adanya kenaikan tenaga kerja di sector jasa kemasyarakatan 8.47%, perdagangan 3.93%, transportasi, pergudangan dan komunikasi 9.78% kenaikan. Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.27% dikarenakan pekerja dari sektor pertanian 54.81%, jasa 14.60%, perdagangan 10.23%, dan sektor industri 8.85%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.33%, tingkat pengangguran untuk SMK 11.41%, kategori setengah menggagur 7.55%, dan pekerja paruh waktu 20.40%.

Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.01%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 54.73%, perdagangan 9.64%, dan sektor industri 8.96%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.30%, tingkat pengangguran untuk SMK 11.24%, kategori setengah menggagur 6.62%, dan pekerja paruh waktu 22.07%. Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.25%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 48.70%, perdagangan 10.97%, dan sektor industri 10.20%, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.23%, pekerjaan formal seperti buruh, karyawan, pegawai 44.28%, dan kegiatan informal 55.72%. Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 4.28%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 2.98%, konstruksi 0.88%, dan sektor industry 0.65%, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 7.07%, sektor pertanian 2.23%, sektor industri 1.30%.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 1.3 kondisi tingkat pengangguran terbukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah dibanding dengan nasional dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian, industry dan perdagangan sehingga membuat masyarakat bisa melakukan kegiatan dan mendapatkan pendapatan sehari-hari pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan yang

cukup di tahun 2017 tetapi di tahun-tahun selanjutnya mengalami stagnan. Bahkan peningkatan tersebut, membuat kondisi ketimpangan di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih buruk diduga peningkatan ketimpangan tersebut mengakibatkan nilai tingkat ketimpangan atau gini rasio setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur merupakan dampak dari melemahnya perekonomian secara yang terjadi pada tahun 2016 yang berujung adanya kesenjangan.

Grafik 4
Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 4 perbedaan gini rasio Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.362% tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah, Gini rasio Indonesia mencapai 0.394%, dimana kondisi pengeluaran sebesar 17.02%, walaupun pengeluaran tersebut dikatan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 15.91%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.40% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2017 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.359%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah. Gini rasio Indonesia mencapai 0.391%, dimana kondisi pengeluaran sebesar 17.22%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.33%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.25%, yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2018

gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.351%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah.

Gini rasio Indonesia mencapai 0.384%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.29% walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah. Di kota tercatat pengeluaran 16.47% dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.15% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2019 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur, 0.356%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah, Gini rasio Indonesia mencapai 0.380%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.90% dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.66% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2020 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.354%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah. Gini rasio Indonesia mencapai 0.385%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.90%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.89% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Gini rasio atau ketimpangan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan Tingkat gini rasio Nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 4 kondisi gini rasio di Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah dibanding dengan nasional dikarenakan ketimpangan pendapatan setiap daerah berbeda-beda dan setiap daerah juga menerima penerimaan yang berbeda-beda banyaknya lapangan pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian, industri dan perdagangan dan lain-lain perbandingan penerimaan di setiap daerah

Mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan atau gini rasio di Nusa Tenggara Timur tingkat ketimpangan tidak terlalu tinggi masih dikategori sedang di karena ketimpangan antar tiap kabupaten dan kota tidak jauh beda, tingkat gini rasio juga setiap tahunnya mengalami penurunan walaupun persekian persen. Maka dari itu adapun beberapa indikator yang bisa mempengaruhi bahwa adanya pertumbuhan ekonomi inklusif

yang telah di jelaskan di atas maka meskipun pertumbuhan inklusif bukanlah isu yang baru, namun pembahasan mengenai pertumbuhan inklusif masih menjadi pembahasan yang menarik. Saat ini, berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif masih terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020’’

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adanya suatu kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan adanya permintaan pasar yang tinggi, kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada Sadono Sukirno (2008:9). pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dapat dilakukan dari tiga sudut pandang dari Badan Pusat Statistik penetapan Gross Domestic Product (GDP) yaitu :

1. Sudut pandang produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industry pengolahan sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan,

- sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor angkutan.
2. dan komunikasi; sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dari sudut pandang pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
 3. Sudut pandang pengeluaran, GDP merupakan jumlah besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, pengeluaran rumah tangga lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat., disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan suatu proses yang menjamin kesetaraan terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu sehingga adanya pemerataan di setiap segmen masyarakat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai cara antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan, peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, penguatan kapasitas produks, menghilangkan ketimpangan dan menjamin kesetaraan.

Inklusif diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan untuk penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses semua orang (Ali, Zhuang 2007). Pendekatan

pertumbuhan ekonomi inklusif mengambil perpektif jangka panjang sehingga memiliki sifat berkelanjutan serta menghilangkan kesenjangan antara yang miskin dan kaya pertumbuhan ekonomi inklusif menginginkan setiap individu dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat dan akan terus ada apabila selalu terjadi kesenjangan sosial di masyarakat Nurwati (2008). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan katalain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, dan juga adaapun penjelasan yang menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, untuk memulihkan kemiskinan perlu menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk

menciptakan kesehatan fiskal untuk meredam gejala sehingga masyarakat kelompok miskin dapat terlindungi.

Jenis-jenis Kemiskinan Penduduk Miskin

Kemiskinan di bagi Kemiskinan Nur Arianto al Arif (2010). Kemiskinan di bagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya, ketidak sempurnaan pasar keterbelakangan sumber daya alam, produktivitas rendah pendapatan rendah tabungan rendah investasi rendah kekurangan modal.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan pendapatan perkapita disetiap masyarakat dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya apakah alasan dari ketidak merataan pendapatan perkapita dan penyebab mengapa pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar fakto-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya ketimpangan pendapatan.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang Mudrat Kuncoro (2016:120). yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan

keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.

- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju, yang kedua yaitu kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah.

Pengangguran

Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran Nanga (2005:249). Mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan atau biasanya pengangguran juga bisa diartikan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk mencari perkerjaan karena terkendala suatu hal.

Mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan Alghofari, Farid (2010:28) :

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.
- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
- c. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- d. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu waktu seminggu kurang dari 35 jam.

Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran Sadono dan Sukirno (2013:329). Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok

- a. Pengangguran Normal atau Friksional
Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran, mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.
- b. Pengangguran Siklikal
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan

- mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal
- c. Pengangguran Struktural
Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
 - d. Pengangguran Teknologi
Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan

mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi

Gini Rasio

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia indikator Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai rasio gini atau indeks gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

f_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{Ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-

F_{Ci-1} = frekuensi kumulatif dari total -1 pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i - 1).

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin),

prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indeks gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan. ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan sudah diteliti sebelumnya.

Namun belum jelas apakah faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sebab sampai sekarang ketidakmerataan pendapatan masih terus terjadi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sehingga menciptakan berbagai golongan ekonomi masyarakat jadi pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan suatu masyarakat atau menyesuaikan sistem sosial secara keseluruhan, untuk mencapai kemakmuran masyarakat diperlukan berbagai usaha yang konsisten bagi kemakmuran bersama dengan menciptakan berbagai program-program untuk semua kalangan masyarakat seluruh masyarakat Indonesia walaupun pendapatan masyarakat tidak sama akan tetapi perbedaan ketimpangan pendapatan tidak terlalu berbeda jauh karena tidak mungkin provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memiliki ketimpangan yang sama karena indikator yang di hasilkan berbeda-beda, maka dari itu ketimpangan pendapatan hanya bisa diminimalisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode PEGR dan *Analysis Paht* untuk mengetahui nilai pertumbuhan inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut cukup beralasan mengingat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan di akibatkan wabah covid-19. Tingkat ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, demikian pula dengan jumlah pengangguran Sedangkan dalam hal kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis pariwisata, dan industrialisasi, misi tersebut bertujuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, waktu yang dipilih adalah mulai dari tahun 2016 hingga 2020. Dipilihnya tahun 2016 - 2020 dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana keadaan. pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Timur dan faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:80). Adapun kriteria yang sampel yang digunakan dalam pengukuran inklusivitas pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur merujuk pada metode yang digunakan metode PEGR (*poverty equivalent growth rate*) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Klasen (2010:285) Dan untuk menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif menggunakan *analysis path*, beberapa indikator yang tersedia datanya sebagai acuan data tersebut meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan. Data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui media perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah berupa data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020. yang telah disediakan atau yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian maupun dalam analisis data.

Teknik Analisis Data

Menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut: Seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur. Mengukur besar tingkat pertumbuhan inklusif dilakukan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif Metode PEGR Pengukuran pertumbuhan inklusif metode PEGR salah satu metode dalam mengukur pertumbuhan inklusif, dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode tersebut diadaptasi dari metode penelitian pro-poor growth yang pernah dilakukan (Kakwani dan Son 2008:67). Yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR) dengan mengadopsi konsep perhitungan dalam PEGR, pertumbuhan inklusif dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

$$IG_{ij} = \left(\frac{E_{ij}}{E_i} \right) E_j$$

Dimana:

IG_{ij} = Koefisien pertumbuhan inklusif

E_{ij} = Pertumbuhan kelompok i dan kaitannya dengan

indikator j
 E_j = Pertumbuhan indikator j
 E_j Dalam hal ini i mengacu pada kelompok yang kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan

E_{in} = Elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

IG_{em} = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

E_{emg} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

E_{em} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pendapatan rata-rata

Mengacu pada konsep pertumbuhan inklusif yang terdiri dari 3 indikator yaitu PDRB, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan maka ketiga indikator tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Indeks inklusif untuk menurunkan Kemiskinan

$$IG_p = \left(\frac{E_{pg}}{E_p}\right)G_g$$

- a. Indeks inklusif untuk menurunkan Pengangguran

$$IG_{in} = \left(\frac{E_{in.g}}{E_{in}}\right)G_g$$

- b. Indeks inklusif untuk menurunkan Ketimpangan Pendapatan

$$IG_{em} = \left(\frac{E_{em.g}}{E_{em}}\right)G_g$$

Dimana:

IG_p = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

E_{pg} = Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

E_p = Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

G_g = Pertumbuhan ekonomi

IG_{in} = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

E_{jpg} = Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Populasi meliputi 22 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Perhitungan indeks pertumbuhan inklusif dilakukan dengan menggunakan metode PEGR seperti yang dilakukan oleh (Klasen, 2010). Adapun untuk menghitung indeks inklusif adalah sebagai berikut :

$$IG = \frac{IG_p + IG_{em} + IG_{in}}{3}$$

Dimana:

IG = Indeks Pertumbuhan Inklusif

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan gini rasio

Setelah mengetahui nilai setiap pertumbuhan dan apabila nilai Pertumbuhan dapat dikatakan inklusif, apabila nilai dari $IG \geq \hat{g}$.

- b. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan menggunakan analisis jalur (*analysis path*).

1. Analisis Jalur (*analysis path*)

Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel intervening, analisis jalur adalah penggunaan analisis berganda untuk menafsirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori, untuk koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel (Muhidin,2009:56) . Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel intervening yang dapat memediasi pengaruh dari variabel independen dan dependennya. dengan *analysis path* ini kita dapat mengetahui nilai signifikansi dari variabel intervening. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. Diagram jalur dalam penelitian terdiri atas satu persamaan substruktur dapat dilihat variabel X1, X2, X3 yang mempengaruhi antar variabel bebas, selanjutnya X1, X2, X3 terhadap variabel Z tanpa melalui variabel Y adalah pengaruh langsung *direct effect* sedangkan pengaruh variabel X terhadap Z melalui variabel Y sebagai pengaruh tidak langsung *indirect effect*, variabel Y disini disebut variabel intervening yang memediasi variabel X dan Z, berdasarkan nilai yang sudah didapat maka variabel mana yang memberikan pengaruh.

Persamaan Analisis Jalur :

$$Y = x_1x_1 + x_2x_2 + x_3x_3 + e_1$$

$$Z = x_1x_1 + x_2x_2 + x_3x_3 + y + e_1$$

Dimana :

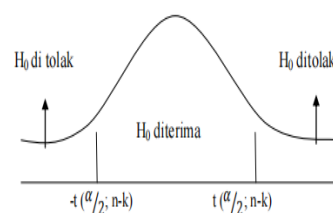
- Y = Pertumbuhan ekonomi
- Z = pertumbuhan ekonomi inklusif
- X₁ = Tingkat kemiskinan
- X₂ = Tingkat pengangguran terbuka
- X₃ = Gini rasio

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (uji parsial) merupakan pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi secara individu berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain konstan (Sugiyono 2018:223). Jika koefisien regresi signifikansi menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent (*explanatory*) secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji koefisien hipotesis $H_0 = 0$

Gambar 1
Kurva uji t

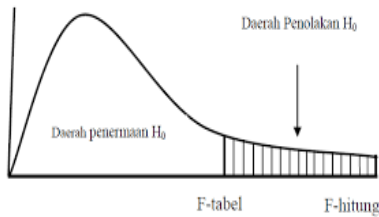


b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji

apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Gambar 2
Kurva uji F



c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya berfungsi untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sujarweni dan V. Wiranta 2015:164). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol atau satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

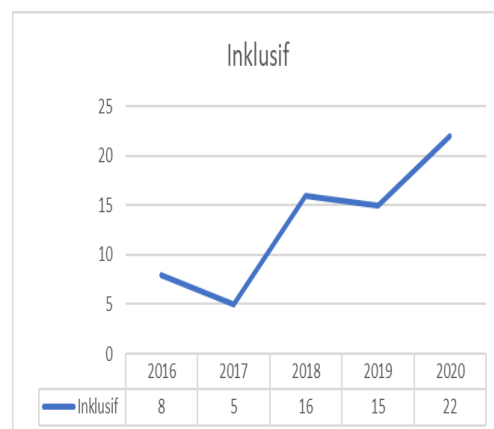
Hasil Uji Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinyatakan inklusif, apabila indeks pertumbuhan inklusifnya lebih besar atau sama dengan pertumbuhan ekonominya. metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif yang dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode yang diadaptasi dari metode penelitian *pro-poor growth* yang pernah dilakukan oleh Kakwani dan Son

(2008) yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR). Mengacu pada konsep pertumbuhan

Bahwa rata-rata pertumbuhan inklusif trend stagnan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.64%. Indeks pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan di waktu yang bersamaan pula pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. Belum di katakan Provinsi Nusa Tenggara Timur inklusif dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dilihat dari rata-rata yang disebabkan masih ada beberapa kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur belum bisa mencapai pertumbuhan inklusif. Setelah melakukan perhitungan dari 110 sampel yang dilakukan 21 kabupaten dan 1 kota selama 5 tahun, selama melakukan observasi 4% atau 46 sampel yang mencapai pertumbuhan inklusif, dan 96% atau 64 sampel masih belum inklusif, selanjutnya dari jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif dari 2016 sampai 2020 gambar 4.3 di ketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan bahwa walaupun tahun 2017 mengalami penurunan walaupun tidak begitu jauh.

Grafik 6
Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Berhasil Mencapai Pertumbuhan Inklusif Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data diolah oleh penulis : 2022

Grafik 6 tahun 2016 daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif antara lain Kupang, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.

Tahun 2017 Belu Ende Ngada Manggarai Manggarai Timur. Tahun 2018 Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Sikka, Manggarai, Rote Ndao, Malaka, Kota Kupang, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Ngada, Ende, Belu. Tahun 2019 Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Sikka, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka. Tahun 2020 sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijun, Malaka, Kota Kupang.

Pembahasan Penelitian

Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi inklusif di setiap kabupaten/kota belum merata karena di setiap kabupaten/kota memiliki nilai yang berbeda dari segi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan nilai pertumbuhan inklusif berbeda, daerah-daerah yang mencapai kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif berarti memiliki pertumbuhan yang baik sebaliknya daerah-daerah yang belum mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki kondisi yang belum baik, pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sarana untuk meraih kesejahteraan melainkan lebih dari itu, pertumbuhan yang tinggi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu juga ditentukan oleh mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan untuk menekan kesenjangan antar golongan.

Pertumbuhan inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi yang baru kan tetapi juga memastikan adanya kesamaan antara semua lapisan masyarakat terkhusus masyarakat miskin tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya (Prasetyantoko :

2012). disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak semua masyarakat memperoleh manfaat yang sama jika dilihat pada kuadran pertumbuhan ekonomi inklusif tahun 2016 sampai 2020 Nusa Tenggara Timur di 21 kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi inklusif meningkat di setiap tahunnya faktor penyebabnya menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif di 21 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 seluruh kabupaten/kota di Kuadran IV menggambarkan penurunan kemiskinan, pengangguran dan gini rasio seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, Kuadran IV kemungkinan, apabila nilai indeksnya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi ($IG > Gg$). Artinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang miskin (*pro poor*). Hasil penelitian ini sama hanya dengan penelitian yang dilakukan Dara A.N Prabandi (2018) menghitung dan menganalisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) oleh Klasen (2010).

Pertumbuhan ekonomi inklusif pada masing-masing daerah di provinsi nusa tenggara timur mengalami arah yang baik karena dari jenjang waktu 2016 sampai 2020 pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan menunjukkan nilai yang turun mengakibatkan sebagian banyak kabupaten/kota yang mencapai pertumbuhan inklusif

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif di Nusa Tenggara Timur

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel intervening

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih besar $0.366 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rendah belum tentu menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Wulan Retno Hapsari (2019) dimana mengenai permasalahan tentang kemiskinan turun tidak dapat serta menyebabkan kualitas pertumbuhan langsung bersifat inklusif perlu adanya strategi dan komponen penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

2. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif tidak langsung, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung tingkat kemiskinan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih besar 0.0029 daripada nilai. Pengaruh langsung tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.001 . Hal ini menunjukkan bahwa walaupun keadaan tingkat kemiskinan di setiap tahunnya menurun belum bisa mempengaruhi secara langsung pertumbuhan inklusif.

3. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran

terbuka memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih besar $0.333 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Seran (2017) . Dimana adanya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengisyartkan bahwa tidak ada pengaruh variabel lain sehingga apa bila terjadi kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka disetiap kabupaten/kota menimbulkan reaksi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka tidak mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi inklusif, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung tingkat kemiskinan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih kecil -0.0189 daripada nilai pengaruh langsung tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 0.007 . Disisi lain apabila tingginya dan rendahnya tingkat pengangguran terjadi mengakibatkan terjadinya pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

5. Pengaruh gini rasio terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gini rasio memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih

besar $0.211 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa gini rasio rendah belum tentu menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan McKinley (2010) dimana mengenai permasalahan tentang gini rasio turun tidak dapat serta menyebabkan kualitas pertumbuhan langsung bersifat inklusif perlu adanya strategi dan komponen penting lainnya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

6. Pengaruh gini rasio terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara gini rasio mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan gini rasio mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif tidak langsung, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung gini rasio terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih kecil -0.02228 daripada nilai pengaruh langsung tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.027 . Hal ini menunjukkan bahwa walaupun keadaan gini rasio di setiap tahunnya menurun mempengaruhi secara langsung pertumbuhan inklusif.

7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih kecil $0.000 <$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Ali dan Zuang (2007) dimana adanya pertumbuhan

ekonomi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengisyartkan bahwa adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang sama.

Setelah mengetahui hasil dan pembahasan di atas, selanjutnya akan melakukan implikasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Implikasi hasil penelitian diperlukan untuk melihat bagaimanakah upaya mempercepat inklusif pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

- a. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif H^1 dikarenakan ada faktor lain yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga H^4 diterima
- b. Tingkat pengangguran terbuka diketahui bahwa berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^2 diterima dan faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif H^5 di tolak
- c. Gini rasio diketahui bahwa tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^3 ditolak dan faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung tidak mempengaruhi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif H^6 di tolak
- d. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^7 diterima

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020 kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Timur tahun 2016–2020 di 21

Kabupaten dan 1 kota memiliki tren yang meningkat bahkan di tahun 2020 seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif dikarenakan nilai pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pada nilai pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengartikan bahwa seluruh masyarakat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang di dukung dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan setiap daerah, walaupun di tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat itu pun tidak terlalu berdampak secara menyeluruh dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Faktor-faktor yang memengaruhinya terciptanya adanya pertumbuhan yang inklusif di Nusa Tenggara Timur tidak serta hanya berpengaruh secara langsung dari tingkat pengangguran melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan inklusif seperti tingkat kemiskinan, gini rasio dan faktor-faktor luar seperti program-program yang di buat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi pertumbuhan inklusif

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yg efektif dan efisien khususnya di daerah dengan pertumbuhan ekonominya masih rendah untuk mendorong memanfaatkan hal yang ada di daerah masing-masing agar semua daerah dapat merasakan pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian mengenai bidang yang sama, diharapkan mampu mengembangkan populasi yang lebih luas seluruh Indonesia yang meliputi

pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, menambahkan variabel yang lain untuk diteliti lagi seperti tingkat Pendidikan, infrastruktur, tingkat kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid, 2010, "Analisis Tingkat Pengangguran" di Indonesia, *Skripsi tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Ali, & Zhuang. (2007). Inclusive Growth Toward A Prosperous Asia: Policy Implications. *ERD Working Paper Series*, (97), 1–44.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur 2016 - 2020* (pp. 335–358).
- bps.go.id. (2010). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2016- 2020.
- Balai Statistik Daerah (BAPPEDA DIY) dan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *Laporan Akhir BAPPEDA DIY*, III.
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Farid, A. (2007). Analisis Tingkat Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980- 2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007*, 1–31.
- Gini Rasio Kabupaten_Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016 - 2020*. (n.d.).
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan

- Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 11.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Internasional NGO Forum on Indonesia Development 2018* Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, New York. INFID
- Kakwani, Nanak dan Hyun H. Son. 2008. Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. *The Pakistan Development Review* Vol. 42 No. 4.
- Klasen, Stephan. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. Asia
- McKinley, T. (2010, Juni). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 2. Manila, Philippines: Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series No.12.
- Mudrajad Kuncoro, “*Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) hlm 120
- Muhidin, Sambas A, dan Maman Abdurahman. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian, Bandung: Pustaka Setia.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nurwati (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10 (1), 1.
- Nur Rianto al Arif, “*Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*” (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 227
- Prabandari, D. A. N. (2018). *Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES: Prakarsa
- Rauniar, Kanbur. 2009 *Perekonomian Indonesia Era Order Lama Hingga Jokowi* (cetakan Kedua): Tulus T.H Tambunan 2015 : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sadono Sukirno. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, 2013, hlm 329
- Seran, Sirilnius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 59-71.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Edisi Kedua). Jakarta : Kencana.
- Todaro, Smith. (2006) *Pembangunan Ekonomi* (9th ed). Jakarta Erlangga.
- Todaro, Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi Kesebelas). Terjemahan oleh Agus Dharma. 2011. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1280257/bps->

[pertumbuhan-ekonomi-ntt-stagnan-
lima-tahun-terakhir](#)

<https://dqlab.id/mengenal-path-analysis-salah-satu-penerapan-statistik-parametrik>

<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>

[RPJMD P PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023.pdf](#)Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam RATulangi, Manado.

Albercht,W. Steve, Albercht, Conan C., and Albercht, Chad O. 2006. Fraud Examination Second Edition. Canada: Thomson South-Western.

The Institute of Internal Auditors. 2017. "International Standards for The Professionals Practice of Internal Auditing 2017". Retrieved from <https://na.theiia.org>, on 1st March 2019.